

DAFTAR PUSTAKA

- Dhea Wijaya Sari, 2018. *Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata
- Astari Maharani, 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Apabila Terjadi Kerusakan Pada Kulit Wajah Setelah Proses Perawatan (Studi pada Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Jasmine Hanafi, 2013. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Klinik Kecantikan Estetika (Studi Pada Klinik Kecantikan Estetika Kusuma Cabang Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Siska Diana Sari. *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*. Madiun: Universitas PGRI Madiun
- Konsil Kedokteran Indonesia, 2012. *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, halaman 54-56
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017. *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Olga Stephanie Gloria, 2017. *Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Siska Diana Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perpektif Hak Konstitusional Warga Negara, *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol 6 No 2 Oktober 2018, hal 140-154

Yusfi Risna, 2009. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan, Semarang: Tesis, Unika Soegijapranata.

Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis Semarang: Unika Soegijapranata.

Hetmi Wowor, Daud Liando, Joyce Rares. 2016. *Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. *Society* XX(3), 103-123

Rifa Yasirah, 2018. Implementasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI

Adies Junita Sari. 2015. Perizinan Dinas Kesehatan Terhadap Klinik Kecantikan di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Ivan Fauzani Raharja. 2014. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan. *Inovatif VII (II) Mei 2014*: 117-138

- Meri Imun, Handayani, Irwan Hadi, Rudy Hidana, Anna Yuliana, Diana Haiti et al. 2020. *Etika Profesi & Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Tiromsi Sitanggang. 2017. *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Pasien*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 2017;2(1):198-211
- Arie Himawan. 2019. *Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Universitas Pasundan..
- Al Fiani Nenden Iryatin. 2017. *Pengambilalihan Pengelolaan Jembatan Timbang Oleh Pemerintah Pusat Terkait Buruknya Pelayanan Publik di Jembatan Timbang*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Nicolai, P. & Olever, B.K., 1994, *Bestuursrecht*, Amsterdam.
- Ayu Lestari Trimas. *Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan Pada Puskesmas Poned Kota Semarang*. Semarang: Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Gito Abdussalam. 2016. *Aspek Perlindungan Hukum Rekam Medis yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Indra Yudha Koswara. 2020. *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jogjakarta: Deepublish

Ayu Shanta Theresia Sitorus, Wahyu Andrianto. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Klinik Layanan Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang- Undang Kesehatan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Michelle Gabriele Monica Rompis. 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik*. *Lex Crimen* 2017:VI(4);71-78

Soesi, Haryanti. *Perlindungan Hak Pasien Atas Kelalaian Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas (Studi Kasus Pada Puskesmas Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang)*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Kudus, 2004. *Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pelayanan Bidang Kesehatan*. Kudus: Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pemerintah Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia, 2002. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 Amandemen 2002. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia, 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

